

AKRUAL

Jurnal Akuntansi

<http://fe.unesa.ac.id/ojs/index.php/akrl>

**MENCIPTAKAN MUTU PERGURUAN TINGGI (*HIGHER EDUCATIONS*)
BERSKALA INTERNASIONAL MELALUI
STRATEGI PENERAPAN TATA KELOLA UNIVERSITAS YANG BAIK
(*GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE*)**

Pujiono

Made Dudy Satyawan

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Email:

Artikel diterima: 25 juli 2011

Terakhir direvisi: 20 Oktober 2011

Abstract

This study sought to strip the university in the era of globalization, and the application of good governance. Globalization has changed the university (colleges) that exist in the world vying to become world class University. Most universities (colleges) in Indonesia have transformed itself from the university for teaching to be research university. Several models of approaches can be adopted to implement good governance in the face of global challenges that can be done through a model or framework of bureaucratic, political, collegial, and symbolic. Besides the university (college) should be able to guarantee transparency, accountability, rensponsive, reponsibility, independency, and fairness as well as other additional principle should be in accordance with the vision and mission of the university.

Keywords: *Good University Governance, globalizations, and models of approaches*

PENDAHULUAN

Tantangan dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi di era sekarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan globalisasi. Globalisasi telah mengubah manusia yang berkaitan dengan peradaban manusia yang semakin dinamis, komplek, dan terbukanya dunia teknologi informasi. Hal ini menyebabkan perguruan tinggi di seluruh dunia umumnya dan di Indonesia pada khususnya harus mengubah sistem tata kelola. Semakin komplek dinamika yang dihadapi oleh suatu Universitas (*Higher Educations*) memerlukan tata kelola yang baik untuk setiap universitas.

Salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Surabaya adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang telah berusaha menstranformasikan diri menjadi Universitas. Perubahan ini semata-mata untuk menjaga dan meningkatkan reputasi dan ciri khas baik dedikasi maupun komitmen civitas akademika bersama para alumni dalam berkontribusi kepada

masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia dan selalu diakui secara luas sampai tingkat internasional. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Negeri harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan mengimplementasikan tata kelola universitas atau *Good University Governance* (GUG) yang baik.

Beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia telah mengubah status dari PTN biasa menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Namun dengan ditolaknya status Badan Hukum Pendidikan maka beberapa perguruan tinggi akhirnya berpindah status ke dalam Badan Layanan Umum. Status PTN biasa menjadi BHP telah mengubah dalam sistem tata kelola, begitu pula PTN umum menjadi PTN BLU juga memerlukan perubahan tata kelola. Sebuah sistem tata kelola adalah penting dalam rangka memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara efektif dan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam hal transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat yang mereka layani. Mengingat peran penting dalam masyarakat dan dalam pembangunan nasional bidang ekonomi dan sosial, serta ketergantungan mereka kepada masyarakat, tata kelola yang baik penting dalam kasus universitas (MacCarthaigh and Horan, 2010).

Visi dan misi secara umum perguruan tinggi adalah tri dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Melalui pengajaran yang baik suatu perguruan tinggi harus bisa mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dan ilmu pengetahuan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan peradaban manusia yang semakin dinamik. Di sisi lain, penelitian merupakan tugas akademisi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan secara ilmiah menjadi jelas. Hasil penelitian tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat dalam hubungan berbangsa dan bernegara ataupun untuk seluruh masyarakat dunia. Tuntutan berikutnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi tidak semata menghasilkan karya untuk dirinya sendiri tetapi harus diabdikan kepada masyarakat sekitarnya, sehingga mempunyai kemanfaatan dengan pihak lain di luar lingkungan Perguruan tinggi.

Pemikiran terhadap bagaimana konsep penyelenggaraan institusi perguruan tinggi yang dianggap cukup ideal untuk menghadapi tantangan-tantangan baru tersebut, haruslah memperhatikan keterlibatan dan terpenuhinya kebutuhan dari seluruh *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) yang terkait dengan institusi perguruan tinggi. Keterlibatan seluruh *stakeholder* tersebut harus bisa mengharmonisasi konsep penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) dengan penerapan visi, misi, dan tujuan sebagai agen pencetak para tenaga kependidikan dan tenaga profesional yang dipercaya masyarakat baik skala nasional maupun internasional.

Dinamika perubahan peradaban manusia yang semakin dinamis, kompleks, dan semakin terbukanya dunia teknologi informasi, tantangan yang dihadapi universitas untuk tetap pada posisi dan perannya di masyarakat nasional dan internasional menuntut kepeloporan dalam perubahan yang cerdas dan inovatif berbasis kekuatan teknologi informasi. Tantangan baru bagi perguruan tinggi negeri di Indonesia adalah bagaimana menumbuhkan sumber pendanaan baru yang

produktif, pengelolaan keuangan, kebebasan lebih besar dalam merumuskan kurikulum dan hal lain yang terkait dengan bidang akademis, akuntabilitas publik dan sebagainya.

KAJIAN PUSTAKA

Kata Universitas berasal dari bahasa latin yang berarti masyarakat atau korporasi. Universitas telah hidup di negara Uni Eropa pada abad pertengahan sebagai komunitas akademisi dan mahasiswa berusaha mempelajarinya tentang beberapa manuskrip yang ada, biasanya bersifat religius (Jackson and Cowley, 2003). Pengertian tentang universitas diperjelas oleh Komisi Royal University of Melbourne, yang berarti tempat pendidikan yang dikombinasikan dengan kemajuan pengetahuan dan nantinya berguna untuk memperbaiki lingkungan internal dan eksternal. Dari definisi ini menunjukkan bahwa universitas adalah tempatnya para akademisi yang berusaha untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan yang nantinya bisa mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Di dalam artikelnya, Lombardi *et al.* (2002) menjelaskan bahwa dalam inti akademik, peranan fakultas memberikan arahan pengendalian terhadap kualitas penelitian dan pengajaran dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian diharapkan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang nantinya bisa dipakai dalam proses pengajaran. Proses kegiatan ini tentunya untuk memperkaya pelayanan terhadap mahasiswa. Untuk mencapai pelayanan yang baik perlu adanya fasilitas dan peralatan yang memadai, berbagi teknologi, layanan dukungan administratif, dan berafiliasi dengan dunia usaha untuk memberikan dukungan terhadap penelitian dan pengajaran. Secara umum fungsi perguruan tinggi tidak lain adalah untuk mengembangkan, menstransfer, dan mempelajari ilmu pengetahuan. Dengan demikian, universitas (*higher educations*): (1) harus bisa mempertahankan dan mengembangkan dasar intelektual dan budaya yang ada pada masyarakat, (2) mempromosikan pengembangan sumber daya manusia dan membantu untuk memelihara identitas suatu kebudayaan, (3) pemberian inspirasi dan rasa bangga kepada masyarakat yang berupa prestasi dari waktu ke waktu, dan (4) mempromosikan dialog untuk mengapresiasi dan menghormati perbedaan budaya (Ginkel, 2006).

Universitas (*higher educations*) yang dihuni oleh para akademisi cenderung lebih loyal kepada disiplin ilmu dari pada institusinya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa akademisi yang disibukkan dengan karya-karya pribadinya yang bisa menunjang karier dan nama baiknya. Dampak dari sikap ini menjadikan para akademisi (*scienctist*) cenderung bersifat individualis, egois, dan bersikap menjaga integritasnya. Para akademisi berfikir bahwa dengan karya-karya tersebut bisa memajukan nama institusi tempat mereka bernaung.

Untuk menghasilkan karya-karya tersebut universitas (*higher educations*) di Indonesia terkadang perlu dipikirkan sumber pendanaan, batasan otonomi, campur tangan politik terkadang sangat mempengaruhi kualitas universitas. Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia terkadang masih disibukkan dengan pencarian dana untuk menunjang kegiatan akademik, yang mana masih bersumber dari Rupiah Murni

(APBN) dan didukung pula oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Asal usul pendanaan sering menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas lulusan yang dihasilkan. Begitu pula tentang batasan otonomi yang diberikan terhadap PTN dalam bentuk BHP atau BLU. Otonomi yang dimaksud terkait dengan akademis atau non akademis perlu mendapatkan pengkajian yang mendalam. Selain itu, campur tangan politik sangat mempengaruhi terhadap kualitas dari PTN dalam menjalankan penerimaan mahasiswa, proses kegiatan akademik, dan setelah itu menghasilkan *out put* yang nantinya terjun dalam lapangan kerja.

Harapan masyarakat terhadap Perguruan Tinggi baik negeri atau swasta sangat besar untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang berguna terhadap masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Untuk menunjang aktivitas tersebut diperlukan tenaga pendidik dan kependidikan yang bagus, fasilitas dan peralatan yang memadai, biaya pendidikan yang murah, mempunyai sistem pengelolaan manajemen yang baik, dan yang menjadi mahasiswa adalah orang yang benar-benar berniat menggali dan menambah ilmu pengetahuan. Dorongan perguruan tinggi di Indonesia untuk menjadi universitas kelas dunia (*world class university*), membutuhkan adanya dukungan terhadap kualitas, ketersediaan beasiswa untuk pendidikan dan penelitian yang didasarkan pada moral dan etika yang kuat untuk membangun negara yang berakar pada budaya bangsa.

Perguruan tinggi besar ataupun kecil harus bisa beradaptasi cepat berkenaan dengan perubahan lingkungan. Banyak sekali tuntutan masyarakat yang berupa pelatihan khusus, penelitian umum, kemitraan, cara pendanaan dan kolaborasi dengan lembaga lain baik antar perguruan tinggi atau bukan perguruan tinggi. Universitas (*higher educations*) merupakan tempat dimana orang bebas berfikir dan berdebat secara terbuka guna meningkatkan sumber-sumber pengetahuan dimana peradaban manusia bergantung padanya.

Dengan diterbitkannya Paket Undang-Undang Keuangan Negara khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum, menjadikan KPPTJP 2003-2010 yang dicanangkan untuk mencapai *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) serta ditunjang dengan PP. 17 2010 universitas (PTN) dapat menjadikan dirinya sebagai salah satu Institusi Pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesehatan organisasi dan pada akhirnya mampu menjadi suatu institusi pendidikan tinggi yang memiliki daya saing yang tinggi baik di lingkungan universitas dalam negeri maupun universitas di luar negeri. Pemerintah dalam hal ini berusaha untuk memenuhi tantangan global yang mau tidak mau harus dihadapi oleh semua universitas (*higher educations*) terutama untuk perguruan tinggi negeri. Tuntutan global ataupun tuntutan pasar sulit untuk dihindari dan bahkan harus dihadapi dengan penerapan *Good University Governance* (GUG) yang sesuai dengan kaidah yang bernuansa kebangsaan.

PEMBAHASAN

Good university governance merupakan sebuah konsep yang muncul karena kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dan institusi perguruan tinggi memang tidak dapat disamakan dengan penyelenggaraan sebuah negara atau korporasi. Perbedaannya adalah nilai-nilai luhur pendidikan yang harus dijaga dalam pelaksanaannya. Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip dasar untuk membawa sebuah perguruan tinggi menuju *good university governance*. Memahami prinsip-prinsip dasar dalam *good university governance* akan memacu untuk mencari bentuk terbaik dari sebuah perguruan tinggi yang paling dekat dengan *civitas akademika*.

Secara sederhana, *good university governance* dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep “*good governance*” dalam sistem dan proses *governance* pada institusi perguruan tinggi, melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum. Tujuan dasar pengembangan pendidikan dan keilmuan akademik, pengembangan manusia seutuhnya. Hal lainnya ditempatkan sebagai alat atau *means*, bukan merupakan tujuan dasar.

Keistimewaan institusi perguruan tinggi dibanding institusi lain terletak pada fungsi dasarnya, yaitu dalam hal pendidikan, pengajaran dan usaha penemuan atau inovasi (riset). Fungsi-fungsi inilah yang kemudian mendefinisikan peranan perguruan tinggi dalam masyarakat. Wacana yang kemudian sering mengemuka dalam penyelenggaraan perguruan tinggi kemudian adalah mengenai *academic excellence* dan manajemen perguruan tinggi, termasuk dalam hal pembiayaan. Jawaban dari kedua wacana ini kemudian bergantung pada bagaimana pemahaman suatu negara dalam penerapan prinsip-prinsip dasar konsep *Good University Governance*.

Bentuk Penerapan *Good University Governance*

Good University Governance sendiri sebenarnya bukan merupakan sebuah konsep yang baku dalam penerapannya, kecuali dalam hal prinsip-prinsip dasar manajerialnya. Penerapan ini dapat berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi dan paham yang dianut oleh suatu bangsa atau masyarakat. Contohnya, *Good University Governance* di Amerika Serikat biasanya diterapkan dengan memberikan otonomi penuh, baik dalam hal akademik maupun manajerial dan pembiayaan, terhadap institusi perguruan tinggi selama masih dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensinya, pengaruh pemerintah relatif lemah dan sebaliknya, kewenangan manajer eksekutif dan dewan suatu perguruan tinggi menjadi kuat (Lombardi *et al.*, 2002). Hal ini berbeda dengan sebagian besar negara-negara Uni Eropa, dimana *good university governance* diterapkan dengan pemberian otonomi dalam hal akademik tetapi tidak sepenuhnya dalam hal manajerial dan pembiayaan, sehingga pengaruh negara dalam hal manajerial menjadi cukup besar. Beberapa negara seperti Austria bahkan menanggung penuh biaya pendidikan tinggi sehingga mahasiswa suatu

perguruan tinggi tidak perlu membayar biaya pendidikan. Sementara negara-negara Asia Tenggara (termasuk Indonesia) umumnya masih mencari bentuk terbaik dan berkuat di antara kedua ekstrim tadi.

Nampaknya ada sebuah kesepakatan atau konsensus umum mengenai pentingnya otonomi dalam usaha pencapaian *academic excellence* (yaitu dalam hal pengajaran dan riset) untuk perguruan tinggi, akan tetapi hal yang sama belum berlaku dalam hal manajerial dan pembiayaan. Perbedaan pandangan ini biasanya terkait dengan pentingnya fungsi perguruan tinggi bagi masyarakat dan mahal biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kecenderungan saat ini, tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi biasanya dianggap dapat membebani negara dan masyarakat, sehingga perguruan tinggi diharapkan berusaha mencari sumber-sumber pembiayaan mandiri. Hal ini, mengakibatkan biaya pendidikan tinggi menjadi mahal.

Penerapan dalam *Good University Governance* dalam suatu lembaga pendidikan tinggi perlu disesuaikan dengan sistem suatu negara dan tata nilai yang dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Pusser *et al.* (2001) dalam artikelnya telah menawarkan beberapa model tata kelola untuk mengelola suatu institusi perguruan tinggi. Model tersebut berupa kerangka birokrasi, kerangka politik, kerangka kolejial, dan kerangka simbolis.

Pertama, Model kerangka birokrasi telah dikembangkan oleh Stroup (1966) dan Weber (1978) dalam menyelenggarakan universitas seperti yang ada pada birokrasi. Oleh karena itu, karakter perguruan tinggi meliputi pembagian kerja tetap di antara pelaku perguruan tinggi, adanya hirarki dan seperangkat aturan yang mengatur kinerja, dan pemisahan hak pribadi dan institusi, serta pemilihan personil berdasarkan kualifikasi teknis.

Kedua, model kerangka kolejial ditawarkan karena universitas merupakan *collegium* atau komunitas ulama (Baldrige, 1971) dan (Millett, 1962). Universitas dipandang sebagai kolektifitas dalam organisasi yang mana para anggotanya sebagai sumber daya utama. Model ini menekankan pada partisipatif, pengambilan keputusan yang demokratis sesuai dengan bentuk suatu organisasi. Jadi yang menentukan tujuan dan kontrol organisasi adalah para pelaku yang dalam perguruan tinggi secara profesional yang ditunjang dengan keahlian dan nilai kebersamaan.

Ketiga, model kerangka politis sebagaimana yang dikemukakan oleh Baldrige (1971) mengasumsikan bahwa dalam suatu organisasi dapat dipelajari sebagai miniatur sistem politik. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa suatu institusi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan manajemen pengelolaan kampus tidak ubahnya seperti suatu negara dalam menyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Proses politik manajemen kampus menunjukkan bahwa beberapa kampus di perguruan tinggi telah mengadopsi sistem politik untuk memilih, menunjuk atau mengusulkan pimpinan yang ada di lingkungan universitas.

Keempat, dalam kerangka simbolis suatu organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang mana muncul suatu struktur organisasi dan tata kelola. Keberadaan pemimpin diperlukan untuk membangun dan memelihara suatu sistem dengan mendasarkan pada makna kebersamaan, paradigma, persepsi umum, dan bahasa

(Pfeffer, 1981). Pendapat ini kemudian didukung oleh (Bensimon, 1989) yang memberikan suatu penguatan bahwa kerangka simbolis juga berusaha untuk mempertahankan simbol ritual dan mitos yang menciptakan suatu sistem pemersatu lembaga, sementara itu dalam pendekatan tradisional telah membuat perbedaan antara tata kelola, manajemen, dan gaya kepemimpinan. Pendekatan tradisional yang dikemukakan Pusser dan Ordorika (2001) menjelaskan bahwa, (1) pada struktur dan proses pengambilan keputusan, (2) struktur dan proses untuk mengimplementasikan keputusan, dan (3) menjelaskan bahwa struktur yang berkaitan dengan posisi, kantor, dan peran formal pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan. Praktiknya, institusi pendidikan perguruan tinggi mencoba memberikan suatu proposisi bahwa sifat kerangka politik lebih ditekankan. Namun, tidak melupakan model dari pendekatan birokrasi, kolegial, dan simbolik yang nyata-nyata banyak mewarnai keberadaan tata kelola institusi pada perguruan tinggi di Indonesia.

Berbagai model pendekatan tata kelola perguruan tinggi yang diadopsi di Indonesia terkadang juga ditambahkan dengan nilai-nilai etika dan moral. Nilai etika dan moral yang ditambahkan untuk menjaga perilaku yang selaras antara kepentingan lembaga dan kepentingan pejabat, antara kepentingan umum dengan kepentingan individu (Noor, 2008). Lebih lanjut dalam perspektif tata kelola universitas yang baik, nilai etika dan moral merupakan dasar untuk mencapai keseragaman dalam perilaku manusia yang berkaitan dengan perilaku yang baik atau buruk menjadi kode etik manusia yang berasal dari pemikiran agama. Agama selalu berfikir selaras dengan kebebasan nilai-nilai etika dari pengaruh kehidupan pribadi dan sosial. Dengan cara menanamkan etika dan moral dari suatu agama, sehingga diharapkan bisa memberikan hasil yang baik dalam penerapan tata kelola universitas yang baik.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Prinsip-prinsip secara umum tentang *good governance* untuk perguruan tinggi hampir sama dengan sistem yang diterapkan pada sebuah korporasi (perusahaan). Secara umum prinsip-prinsip *good governance* seperti: transparansi, akuntabilitas, responsif, *responsibility*, *independensi* dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut diadopsi dalam perguruan tinggi yang kemudian disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan perguruan ini tersebut dalam suatu batasan wilayah negara. Jacob dan Rust (2010) dalam pemikirannya, menambahkan unsur koordinasi dan aliran informasi menjadi bagian dari tata kelola dalam suatu universitas (*higher educations*). Di samping itu, beberapa peneliti secara umum menambahkan unsur otoritas, konsultasi, dan representasi. Pada lingkungan asosiasi perguruan tinggi di Irlandia (IUA, 2007) dijelaskan bahwa suatu perguruan tinggi yang kokoh dalam melaksanakan tata kelola memang harus transparan dan akuntabel. Hal ini, sebagai dasar untuk meletakkan nilai-nilai pembangunan ekonomi dan sosial di negaranya. Oleh karena itu (IUA, 2007) mengharapkan bahwa universitas yang telah menerapkan tata kelola yang baik akan bisa mencapai universitas berkelas dunia (WCU). Untuk mencapai hal tersebut maka suatu universitas harus bisa berkonsentrasi pada bakat (kepandaian), ketersediaan sumber daya, serta tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik harus

didukung dengan seperangkat aturan, kebebasan otonomi akademik, budaya visi strategi *Team Leadership* yang unggul, transfer teknologi, dan output riset. Namun di dalam ketersediaan sumber sumber daya perlu memperhatikan anggaran sumber daya masyarakat, sumbangan penghasilan, biaya pendidikan, dan hibah penelitian. Selain itu pihak universitas juga harus berkonsentrasi pada bakat (kepandaian) yang membutuhkan peneliti berkelas dunia sebagai seorang pengajar, memikirkan lulusan, dan menghasilkan riset yang unggul. Dengan adanya tata kelola yang baik maka dalam suatu institusi perguruan tinggi menghasilkan kinerja (*performance*) dan kesesuaian (*conformance*). Kinerja tersebut diharapkan bisa menciptakan nilai (*value creation*) dan pemanfaatan sumber daya (*resources utilization*). Sedangkan kesesuaian (*conformance*) akan ada akuntabilitas (*accountability*) dan penjaminan (*assurance*).

Transparansi

Transparansi mengandung pengertian bahwa suatu institusi perguruan tinggi dalam pengambilan keputusan dan pengimplementasian keputusan haruslah terbuka. Prinsip transparansi ini bisa berkaitan dengan kebijakan hukum dan peraturan, penggunaan sumber daya keuangan dan non keuangan, dan sistem pelaporan dengan menggunakan berbagai media yang bisa dijangkau oleh semua *stakeholder*. Sebagai misal bentuk transparansi bisa dilihat dari sisi pembuatan keputusan pimpinan, penerimaan mahasiswa baru, penerimaan dosen dan karyawan, dan penerimaan serta penggunaan sumber pendanaan (keuangan) universitas harus bisa akses oleh masyarakat secara umum.

Akuntabilitas

Akuntabilitas lebih cenderung kepada tanggung jawab suatu institusi terhadap aturan atau kebijakan yang telah diputuskan oleh suatu institusi. Pengertian ini lebih menekankan pada ketaatan segenap personal yang ada dalam suatu institusi univeritas (*higher educations*) dalam mematuhi dan menjalankan semua kebijakn dan aturan yang telah mengikat mereka di suatu institusi. Cara yang dilakukan institusi untuk menjamin akuntabilitas misalnya dengan menerapkan suatu Satuan/Badan Audit Internal atau Penjaminan Mutu. Dari sisi penjaminan sistem manajemen keuangan dan pelaporannya di monitoring oleh Satuan/Badan Audit Internal, sedangkan untuk akademik maka Penjamin Mutu selalu memantau untuk melakukan penjaminan kualitasnya.

Responsibilitas

Resposibilitas mangandung pengertian bahwa suatu institusi harus mentaati semua regulasi atau aturan dibuat dari pihak di luar institusi (eksternal) tersebut. Misalnya Peraturan Pemerintah (PP), keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri, dan sebagainya. Oleh karena itu, univeritas (perguruan tinggi) dalam melaksanakan atau menjalankan kegiatannya tidak boleh melanggar terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pihak-pihak eksternal tersebut.

Responsif

Begitu pula Perguruan Tinggi perlu tanggap (*responsive*) untuk mengadaptasi perubahan lingkungan. Artinya bahwa universitas (perguruan tinggi) harus tanggap dengan semua keinginan stakeholder dan tanggap perubahan lingkungan yang sangat dinamis. Dengan demikian setiap langkah kebijakan yang dibuat oleh suatu institusi selalu memperhatikan keinginan stakeholder.

Independensi

Independensi lebih dalam prinsip *good university governance* menekankan pada kemandirian oleh suatu institusi dalam mengelola suatu universitas (perguruan tinggi). Prinsip ini terkadang mengharuskan adanya otonomi perguruan tinggi. Otonomi perguruan tinggi negeri di dunia mengandung banyak persepsi dan penafsiran yang berbeda-beda. Khusus untuk perguruan tinggi negeri di Indonesia sebagian berharap bisa mengurus institusinya sendiri yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan penggunaan sumber keuangan. Namun terkadang masalah pendanaan baik untuk mahasiswa ataupun pengeluaran gaji pegawainya mempunyai cara yang berbeda-beda.

Keadilan

Prinsip keadilan harus bisa memberikan nilai keadilan terhadap semua *stakeholder* yang ada. Prinsip keadilan mendorong kepada semua pihak yang berhubungan dengan dengan suatu institusi harus bisa mendapatkan rasa adil, dan tidak ada perbedaan pelayanan ataupun fasilitas yang diperolehnya.

Otoritas, Konsultasi, dan Representasi

Prinsip ini menunjukkan bahwa suatu perguruan tinggi atau universitas diharapkan mempunyai otoritas (wewenang) penuh yang bisa digunakan untuk membuat keputusan atau kebijakan. Untuk bisa membuat keputusan atau kebijakan diperlukan otoritas yang jelas tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Oleh karena itu, sering kali prinsip otoritas memerlukan suatu otonomi di setiap universitas (perguruan tinggi). Di samping itu, universitas (perguruan tinggi) juga dituntut menjadi suatu lembaga bagi stakeholder sebagai tempat konsultasi yang berkaitan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan harus bisa memrepresentasi semua kepentingan yang diperlukan.

SIMPULAN

Good University Governance (GUG) membutuhkan kesadaran dan perguruan tinggi ini berbeda dengan institusi bisnis. Untuk bisa menerapkan *good university governance* (GUG) diperlukan dukungan semua pihak (*stakeholder*) dan harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa. Di samping

itu, GUG harus bisa mendorong pembangunan di bidang sosial dan ekonomi yang telah programkan negara dalam strategi pembangunan jangka panjang.

Penerapan GUG di Indonesia tidak bisa semata-mata mendasarkan satu model kerangka pendekatan. Namun perlu perpaduan antara kerangka politik, birokratif, kolejal, dan simbolis. Hal ini terjadi karena universitas (*higher educations*) mempunyai kepentingan yang berbeda dengan suatu lembaga bisnis. Lembaga bisnis cenderung berorientasi pada laba, tetapi lembaga pendidikan lebih mengutamakan pada nilai-nilai integritas dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, moral dan etika, serta kepentingan jangka panjang suatu bangsa. Dengan demikian penerapan prinsip *good university governance* (GUG) yang berupa transparansi, akuntabilitas, rensponsif, reponsibilitas, *independen*, dan keadilan serta prinsip tambahan yang lain harus sesuai dengan visi dan misi universitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldrige, J. Victor. 1971. "Power and conflict in the university; research in the sociology of complex organizations". New York: J. Wiley.
- Bensimon, Estela M. 1989. "The meaning of "good presidential leadership": a frame analysis." *Review of Higher Education* 12:107-23.
- Coser, Lewis A. 1964. "The functions of social conflict". New York: Free Press of Glencoe.
- Dahl, Robert Alan. 1966. "Who governs? democracy and power in an American city". New Haven: Yale University Press.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. "Class and class conflict in industrial society". Stanford, Calif:Stanford University Press.
- Ginkel,V.H. 2006. "Responsibilities, Callenges, Opportunities and Governance-Rethincking The University For The 21st century". United Nation University.
- Jacob, W.J. and Val D. Rust. 2010. "Principles of Good Governance: A Review of Key Themes Identified at the 7th International Workshop on Higher Education Reform. *Comparative & International Higher Education*". Institute for International Studies in Education, University of Pittsburgh, USA and Center for International & Development Education, University of California, Los Angeles, USA.
- Jackson, JG & Cowley, J 2003, "Blinking dons or donning blinkers: fiduciary and common law obligations of members of governing boards of Australian universities", paper presented to Changing law: Australian Law Teachers Association Conference, Brisbane, Qld., 6-9 July.
- Jago, Charles J. 2009. "An Ex-President's Perspective on University Governance". UNBC. January 24.
- Lombardi, J.V., D.D. Craig, E.D. Capaldi, and D.S. Gater. 2002. "The Center Organization, Governance, and Competitiveness". *The Top American*

- Research Universities, An Annual Report from The Lombardi Program on Measuring Universities Performance. August.
- MacCarthaigh, M, and Aidan Horan. 2010. "University Governance: Achieving Best Practice and Meeting Future Chalanges". Research Paper for IUA Conference. Institute of Public Administration. March.
- Millett, John David. 1962. "The academic community; an essay on organization". New York: McGraw-Hill.
- Noor, Abdun. 2008. "Ethics, Religion and Good Governance". JOAAG, Vol. 3. No. 2
- Peterson, Marvin W., and Lisa A. Mets. 1987. Key resources on higher education governance,management, and leadership: a guide to the literature. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Pfeffer, Jeffrey. 1981. "Management as symbolic action: th creation and maintenance of organizational paradigms". Pp.1-52 in Research in organizational behavior, edited by L.L. Cummings and B.M. Staw. Greenwich: JAI Press.
- Pusser, B., & Ordorika, I. (2001) Bringing political theory to university governance: the University of California and the Universidad Nacional Autónoma de México
- Stroup, Herbert Hewitt. 1966. *Bureaucracy in higher education*. New York: Free Press.
- Weber, Max. 1978. *Economy and society*. Berkeley: University of California Press.